

Pengelola Dana Mengaku Takut Diaudit oleh BPK

BANJAR, (PR).-

Pengelola dana desa dan kelurahan di Kota Banjar mengaku tengah resah, setelah tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penggunaan dana desa sebesar Rp 1,3 miliar yang disalurkan oleh Pemkot Banjar.

"Kami takut karena ada dana desa yang sifatnya bergulir ternyata macet, alias tidak dikembalikan oleh penerima," tutur Kurnia, seorang aparat desa di Kec. Pataruman kepada "PR", Jumat (6/11).

Ia mengakui ketakutan itu bukan hanya dirasakan oleh desanya, namun juga oleh desa dan kelurahan lainnya di Kota Banjar. Ketakutan itu, dirasakan lebih kuat oleh desa dan kelurahan yang sudah mencairkan seluruh dana desa dari Bank Jabar.

Ketua Bale Rahayat Kota Banjar Asep Nurdin yang juga pemerhati desa di Banjar, membenarkan soal ketakutan yang dirasakan aparat desa dan kelurahan setelah BPK melakukan audit. Hal itu ia ketahui setelah selama beberapa hari ini berkeliling ke desa-desa dan kelurahan.

"Mereka benar-benar ketakutan. Sudah pasti hal itu karena mereka mengakui adanya kesalahan dalam menggunakan dana desa tersebut, terutama desa dan kelurahan yang sudah mencairkan seluruh dana desa dari Bank Jabar," katanya.

Nurdin mengatakan, ide Wali Kota Banjar soal dana desa itu, ternyata di lapangan tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola dari pihak desa. Dengan demikian, dana yang besar untuk penguatan desa dan

menyejahterakan rakyat desa tersebut tidak dikelola secara profesional.

"Yang mengesankan, belakangan bahkan ada pihak yang sengaja membuat proposal untuk diperjualbelikan agar bisa mencairkan dana desa dengan mudah. Pembuat proposal melakukan itu dengan memanfaatkan ketidakmampuan desa lainnya," katanya.

Wali Kota Banjar H. Herman Sutrisno ketika dihubungi membenarkan soal kehadiran BPK di Kota Banjar untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara yang digelontorkan ke desa-desa.

Hanya sejauh ini, ia mengaku belum tahu hasil audit itu karena BPK masih menjalankan tugasnya, termasuk mengaudit organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kota Banjar.

Herman juga tidak menampik temuan yang menyebutkan bahwa dana untuk penguatan ekonomi desa yang digelontorkan pihaknya kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak desa, bahkan ditengarai ada yang macet.

"Masyarakat mungkin masih berpikir negatif tentang dana tersebut. Ya, karena duit itu duit negara, maka masyarakat berpikir, tidak perlu dikembalikan," katanya.

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang Kalyubi ketika dihubungi mengharapkan agar dana desa itu betul-betul dikelola secara profesional. Cara itu bisa menghindari terjadinya kemacetan sehingga jika ada audit atau apa pun namanya, pengelola keuangan desa tidak perlu cemas dan takut. (A-112)***